

BAB VI

KESIMPULAN

1.1. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, pada penelitian ini menjawab tujuan penelitian mengenai motif latar belakang pembentukan BLU Puskesmas dan bentuk praktek desain struktur organisasi serta budaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Latar belakang pembentukan status BLU Puskesmas dikarenakan adanya tekanan dari pihak organisasi yang memiliki kuasa terhadap Puskesmas. Adanya dukungan internal organisasi atas penetapan status BLU dikarenakan ketidakpuasan dengan kondisi Puskesmas saat ini, sehingga menimbulkan berbagai reaksi berupa inovasi puskesmas untuk pemenuhan pelayanan kesehatan yang lebih baik dari berbagai sisi.
2. Bentuk praktek desain struktur organisasi dan budaya setelah ditetapkan sebagai BLUD Puskesmas adalah ditemukannya konsep budaya privat. *Professionalisme* dan *Entreprenuer* merupakan nilai-nilai budaya privat yang ditemukan dalam praktek BLU Puskesmas. Kemudahan pengelolaan dan realisasi keuangan yang berdampak kepada kelangsungan kegiatan dan peningkatan kualitas pelayanan. Pembinaan dan pengawasan dari berbagai pihak terhadap para pelaksana BLU Puskesmas.
3. Terdapat beberapa kendala yaitu secara implisit struktur organisasi BLU Puskesmas disesuaikan dengan SOTK (Susunan Organisasi Tata kerja), namun pada kenyataannya terdapat makna koersif yang masih berpedoman kepada



struktur lama seperti Pejabat Pengelola Keuangan yang melekat jabatannya menjadi Kasubag. Tata Usaha.

4. Ketidaksesuaian jumlah anggota dengan cakupan kerja, ketidakcapaian program yang ditetapkan oleh Dinkes, serta ketidaksesuaian perilaku pelaksana dengan tujuan konsep BLU seperti kegiatan yang hanya terlaksana untuk formalitas kepengurusan akreditasi dan setelahnya hanya disesuaikan.

1.2. Keterbatasan Penelitian

Terlepas dari pentingnya sebuah penelitian, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. Objek penelitian sudah empat tahun menerapkan PPK BLUD, sehingga sulit untuk mengusut kilas balik mengenai latar belakang motif pembentukan BLUD ini kepada informan yang beberapa sulit untuk ditemui dengan wawancara dan juga sudah ada yang pensiun.
2. Objek penelitian ini terbatas hanya pada dua puskesmas di kabupaten XY, sehingga hasil penelitian ini terbatas dan hanya terfokuskan dengan keadaan di dua tempat tersebut.
3. Jumlah informan dalam penelitian ini hanya terdiri dari lima orang dengan keterbatasan waktu yang mereka sediakan untuk sesi wawancara mendalam.
4. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma postpositivisme dengan rancangan penelitian kualitatif. Proses penelitian ini lebih bersifat seni (kurang terpola) dengan lebih banyak menggunakan data hasil wawancara. Data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber atas jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan peneliti, sehingga para narasumber dan karakter peneliti beresiko mengurangi objektivitas hasil penelitian.

1.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah hendaknya bertindak tegas dengan banyaknya ditemui kejadian mengenai sebuah Puskesmas yang secara formalitas menyesuaikan dengan SOTK sebagai Puskesmas BLUD, sedangkan makna koersifnya masih melekat pada struktur organisasi sebelum BLUD. Seperti Pejabat Pengelola Keuangan yang jabatannya melekat menjadi Kasubag. Tata Usaha.
2. Puskesmas memiliki kendala setelah penerapan BLU dari segi cakupan kerja. Untuk itu Puskesmas hendaknya lebih memperhatikan kendala tersebut. Puskesmas hendaknya memberikan kebijakan agar pegawai memiliki cakupan kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, agar pegawai lebih terfokus dengan masing-masing kerjanya. Solusi lainnya yaitu Puskesmas dapat mengadakan penambahan pegawai dengan perjanjian kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan, tentunya dengan menggunakan dana BLUD.
3. Puskesmas memiliki kendala setelah penerapan BLU berupa ketidakcapaian program yang ditetapkan oleh Dinkes yang sudah dibagi berdasarkan data dari wilayah kerjanya. Pimpinan Puskesmas hendaknya melakukan pembinaan berupa semangat dan dorongan Positif untuk kemajuan pelayanan. Pimpinan Puskesmas hendaknya tetap menjalankan praktek dan pengelolaan saat akreditasi maupun setelah akreditasi. Pembina dan pengawas internal hendaknya mengadakan survei

secara acak terhadap pelaksanaan sehingga tidak hanya terlaksana saat kepengurusan akreditasi saja.

